UNTUK PENGUATAN MITIGASI BENCANA

BNPB Usulkan Anggaran Rp 1,887 Triliun

JAKARTA (KR) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan anggaran senilai Rp 1,887 triliun dalam pagu anggaran tahun 2025, yang salah satunya difokuskan untuk penguatan mitigasi kebencanaan. Usulan anggaran tersebut diungkapkan Kepala BNPB Suharyanto dalam Rapat Pendahuluan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 dengan Anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (4/6).

Suharyanto mengatakan, dari Rp 1,887 triliun tersebut mayoritas dialokasikan untuk rencana kerja penguatan mitigasi bencana senilai Rp 103,250 miliar dan peremajaan atau penyediaan logistik peralatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia senilai Rp 1,7 triliun.

Sejumlah rencana kerja telah disiapkan BNPB mulai dari kebutuhan yang mendesak, seperti pemasangan rambu dan papan informasi bencana pada daerah rawan bencana dan pembuatan early warning system antisipasi potensi bencana hidrometeorologi, hingga rencana jangka panjang pemberdayaan masyarakat.

Selain itu untuk pembentukan Forum Koordinasi Mitigasi Bencana Nasional, Program Desa Tangguh Bencana pada 30 desa, penyusunan rekon untuk provinsi baru, penyusunan RPKB untuk provinsi baru, dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada lima lokasi.

"Kondisi peralatan penanggulangan bencana di pusat dan daerah juga sudah tidak layak pakai lagi dan perlu peremajaan untuk menunjang kesiapsiagaan dalam kondisi darurat," kata Suharyanto.

Dengan begitu, Kepala BNPB mengaku sangat berharap kepada Komisi VIII DPR RI bisa menerima usulan anggaran tersebut, karena kemampuan anggaran mereka sangat terbatas untuk melakukan mitigasi kebencanaan nasional. Sebab secara umum pagu indikatif BNPB untuk rencana kerja tahun anggaran 2025 senilai Rp 927,574 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan sangat drastis sekitar 67,3 persen dari alokasi anggaran 2024.

Bahkan diketahui dari jumlah anggaran kegiatan mitigasi yang dibawahi Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB tersebut hanya mendapatkan alokasi total Rp 57,511 miliar yang lebih kecil dibandingkan tahun 2024 dengan total Rp 175,676 miliar.

Padahal pihaknya menilai mitigasi bencana hal yang sangat penting, selain penanggulangan dampak bencana, supaya Pemerintah mampu menekan dampak kerusakan dan terkhusus jatuhnya korban jiwa akibat bencana alam. Suharyanto merefleksikan dalam medio Januari-Juni 2024 ini sudah ada 860 peristiwa kebencanaan yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan.

Dua di antara ratusan bencana tersebut menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar, yakni bencana banjir bandang disertai lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat dan banjir disertai tanah longsor di Kabupaten Luwu (Sulawesi Selatan).

(Ant/San)-d

Hasto: . . . . . Sambungan hal 1

Namun prinsipnya, Hasto bertanggung jawab penuh terhadap apa yang telah disampaikan baik secara politik, secara hukum maupun sosial.

"Tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud menghasut, menggerakkan orang dimuka umum untuk melakukan tindak pidana," tandasnya.

Sementara pengacara Hasto, Patra M Zen menambahkan, Hasto dilaporkan atas dugaan pelanggaran tiga pasal, yakni Pasal 160 KUHP, Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Patra menjelaskan kliennya tidak diperiksa pada hari ini, namun diklarifikasi dan juga sebenarnya Hasto tidak wajib hadir dalam undangan klarifikasi ini. "Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilakan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu," kata Patra. **(Ant/Has)-f**

Dhony: . . . . . Sambungan hal 1

masih menjabat untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah selanjutnya yang akan terbentuk pada Oktober 2024, terkait pemilihan Kepala Otorita IKN yang baru secara definitif.

Seperti diberitakan kemarin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan pengunduran diri Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe. Menindaklanjuti hal itu, kata Pratikno, telah terbit juga Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN.

Mensesneg membantah mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe berkaitan dengan persiapan rangkaian acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Namun ia mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri Dhony Rahajoe dan Bambang Susantono dari Otorita IKN. **(Ant/Obi)-d**

Bukti . . . . . Sambungan hal 1

"Kita telah menyaksikan salah satu capaian nyata kerja sama ini dalam digitalisasi manuskrip-manuskrip bersejarah dari Kraton Yogyakarta beberapa tahun ini. Bagi saya pribadi, digitalisasi ini bukan sekadar pelestarian warisan, melainkan upaya monumental dalam memelihara dan merayakan kekayaan budaya yang tak terukur. Selain itu, setiap lembaran manuskrip tersebut, senantiasa terjaga untuk pencerahan masa depan umat manusia," tuturnya.

Sultan menyampaikan, digitalisasi membuka asa dalam upaya mengembalikan koleksi manuskrip dalam bentuk fisik ke Kraton Yogyakarta, sehingga generasi mendatang dapat terus belajar dan menghargai kekayaan sejarah dan budaya. DIY sekaligus dengan bangga memperkenalkan Sumbu Filosofi telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Keberhasilan ini, tak hanya memperkuat identitas Yogyakarta di mata dunia, namun juga memperdalam pemahaman dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya yang dimiliki.

"Orkestra yang kita saksikan hari ini bukanlah sekadar pertunjukan musik, tetapi juga manifestasi dari harmoni budaya yang kita junjung tinggi. Sebagaimana setiap musisi orkestra memberikan suara yang unik nan harmonis, begitu pula hubungan antara Indonesia dan Inggris. Setiap diskusi, setiap pertukaran kebudayaan, dan setiap dialog adalah not-not musik berpadu dalam simfoni yang lebih besar dari hubungan kedua bangsa," ungkap Raja Kraton Yogyakarta.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menyatakan, tahun ini menandai perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Inggris. Lebih khusus lagi, untuk merayakan hubungan spesial antara Inggris dan Yogyakarta dengan keunikan dan kesamaan latar belakang budaya dan pemerintahan keduanya.

Bahkan hubungan kerajaan itu telah dirayakan berkali-kali di masa lalu. Termasuk saat kunjungan Yang Mulia Ratu Elizabeth II pada tahun 1974 dan Yang Mulia Pangeran Wales yang sekarang menjadi Yang Mulia Raja Charles Ketiga pada tahun 1989 dan 2008.

"British Army Band Colchester ini terdiri dari musisi dari Royal Corps of Army Music. Mereka tampil dalam acara seremonial di seluruh dunia. Ini merupakan kunjungan pertama mereka ke Indonesia, dan saya harap mereka bisa menikmati keindahan wisata dan kuliner khas Yogya," ungkapnya. **(Ira/Ria)-d**

Butuh . . . . . Sambungan hal 1

Dibutuhkan leadership dan sinergisitas," tandas Walikota Yogya periode 2004-2014 Drs H Herry Zudianto MM dalam Rembug Warga Jogja, Selasa (4/6), di Alra Corner Coffee & Resto Yogya.

Dengan tagline #Jogja Menyala, event yang dihelat untuk 'Menyatukan Ide dan Gagasan untuk Membangun Kota Yogyakarta yang Lebih Baik', ini juga menghadirkan narasumber Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Dr Hargo Utomo MBA, Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardiyanto Setyo Aji SE dan Wakil Ketua Umum Kadin DIY Wawan Harmawan SE MM serta dipandu Wapemred *Kedaulatan Rakyat* Ronny Sugiantoro.

"Siapa pun Walikota Yogya yang terpilih dalam Pilkada 27 November 2024 harus amanah, bukan penikmat jabatan. Ingin melayani Yogya. Punya visi. Dan yang jelas mampu menggerakkan perekonomian, membawa keakraban dan gotong royong/sinergitas, kreatif, punya kemampuan mendengar dan menyatukan puzle-puzzle," tandas Herry. Siapa pun walikota terpilih harus mampu merangkul semua pihak.

Sedang Hargo Utomo menyatakan, Yogya mempunyai potensi jadi magnet creativity dan education. "Potensi-potensi yang ada harus dipetakan, dan ekonomi yang berbasis knowledge, sehingga Kota Yogya bisa menjadi pusat industrialisasi dengan pemikiran besar, menjadi tempat kegiatan ekonomi produktif dan jangan menjadi beban. "Perlu Kepala Daerah (Walikota) yang bisa menjadi pimpinan orkestra dalan pembangunan ekonomi/pariwisata," tandasnya.

Sementara Bobby Ardiyanto menjelaskan hambatan-hambatan dalam pengembangan pariwisata Yogya. "Pariwisata Yogya sedang tidak baik-baik saja. Pariwisata Idul Fitri kemarin turun 30 persen, karena kolaborasi yang kurang, seperti antarkota/kabupaten DIY malah berebut wisatawan, saling pukul. Perlu duduk bersama berkolaborasi. Apalagi tidak lama lagi pintu tol terbuka, ke mana-mana lebih cepat. Yogya harus punya daya tarik yang spesial supaya wisatawan mampir ke Yogya," katanya.

Wawan Harmawan mengatakan, dari sisi pengusaha, harus dipikirkan bagaimana membangun Kota Yogya dengan merangkul semua pihak dan terutama mampu menjadi sales UMKM yang dominan di Yogya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Robby Kusumaharta mendukung jika Walikota Yogya punya latar belakang pengusaha. "Yogya perlu walikota yang kreatif dan telah terbukti," tandasnya.

Tokoh pariwisata Yogya Tazbir SH MHum menyatakan pentingnya mendorong produk Yogya masuk dalam perdagangan dunia. "Beringharjo bisa ditata lebih baik lagi, bahkan Yogya sudah mendunia sebagai kota batik dan UNESCO telah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia, katanya.

Pengusaha Borobudur Silver Selly Sagita menyatakan, pariwisata di Yogya bukan Malioboro saja. Ada Kotagede dengan kerajinan perak dan lainnya. Pengembangan pariwisata harus sinergi dengan semua pihak, jangan mencari kambing hitam tetapi bekerja sama dengan banyak pihak.

(Vin)-f

Fondasi . . . . . Sambungan hal 1

Selama ini, pembangunan di bidang ekonomi memang menjadi panglima. Namun demikian, untuk memastikan agar pertumbuhan dan stabilitas ekonomi dapat tumbuh berkelanjutan, maka yang dibutuhkan adalah fondasi yang benar-benar kokoh, baik fondasi sosial maupun politik.

Pertumbuhan Ekonomi

Ambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebetulnya sah-sah saja dilakukan. Negara yang berhasil menghela pertumbuhan ekonomi hingga dua digit seperti Tiongkok di masa sebelum pandemi Covid-19, misalnya, niscaya akan merasakan kenaikan kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Tetapi, negara yang pertumbuhan ekonominya hanya di kisaran 2-3 persen atau bahkan minus, jangan harap bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman telah banyak membuktikan bahwa sebuah negara yang mengalami masalah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, bukan saja menyebabkan daya beli turun dan inflasi naik, tetapi juga mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran makin meluas. PHK niscaya akan terjadi di mana-mana tatkala kondisi pasar lesu. Jumlah korban PHK meningkat dan ujung-ujungnya mengakibatkan antren jumlah pencari kerja makin panjang. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau usahanya bangkrut, tentu akan masuk makin dalam pada pusaran kemiskinan. Pada titik ini, bukan tidak mungkin keresahan akan menjalar di mana-mana, sehingga stabilitas politik pun akan terganggu.

Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak baik-baik saja, ada banyak riak yang harus dilalui untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Bagi Indonesia, mematok target pertumbuhan ekonomi 5 persen bisa dipastikan sudah ngos-ngosan. Konsumsi rumah tangga yang melemah, inflasi pangan yang tinggi, dan penurunan daya beli masyarakat, tentu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi terganggu. Menempuh jalan terjal mengejar pertumbuhan ekonomi, bila tidak dilakukan dengan hati-hati dan bijak, niscaya akan beresiko kontra-produktif. Sikap lebih hati-hati dan waspada serta penyesuaian kebijakan harus dilakukan agar ekonomi tetap terjaga dan bahkan mampu tumbuh optimal.

Fondasi

Untuk mengawal agar Indonesia tidak terpuruk ditekan faktor eksternal maupun internal, tentu yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar tepat. Bank Indonesia selama ini telah memainkan peran yang baik dalam mengelola keseimbangan kebnijakan yang pro-stability dan pro-growth. Pertama, bagaimana Bank Indonesia mengembangkan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas (pro-stability) nilai tukar rupiah melalui kenaikan suku bunga acuan, tujuannya adalah menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Dengan menetapkan suku bunga tinggi, harapannya adalah para investor tidak menarik keluar modal yang dimiliki. Bahkan, sebaliknya tertarik untuk menanamkan investasi ke berbagai daerah di tanah air.

Kedua, memperkuat perangkat kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan (pro-growth). Selain mendorong agar bank-bank tetap menyalurkan kredit guna mendukung pengembangan usaha, yang tak kalah penting Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran yang difokuskan pada peningkatan keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta perluasan penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.

Ketiga, bagaimana memperkuat fondasi sosial masyarakat. Di luar stabilitas ekonomi, yang tak kalah penting sesungguhnya adalah mempersiapkan fondasi sosial masyarakat yang kenyal menghadapi perubahan dan tekanan.Investasi meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia harus terus dikembangkan agar mereka dapat memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang muncul di pasar kerja dan dunia usaha. Tanpa adanya fondasi sosial yang kuat, niscaya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi akan rapuh .

(Dekan dan Gurubesar Sosiologi Ekonomi Fisip Universitas Airlangga)-d

PPIH . . . . . Sambungan hal 1

jemaah agar ikut mengingatkan mereka tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah berlebih-lebihan," kata Kepala Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah Khalilurrahman, Selasa (4/6).

Menurutnya, arus kedatangan jemaah haji Indonesia terus berlangsung melalui pintu Bandara King Abdul Azis Jeddah. Jemaah kemudian dibawa dengan bus yang disiapkan khusus menuju hotel di Makkah. Setelah transit sebentar, para jemaah yang sudah mengenakan kain ihram, langsung melaksanakan umrah wajib, sebagai bagian dari Haji Tamatu yang diterapkan bagi jemaah Indonesia. Di Masjidil Haram para jemaah bertemu jemaah lain yang jumlahnya terus bertambah.

Menurut Khalilurrahman, menjaga ritme ibadah perlu dilakukan jemaah mengingat puncak haji masih beberapa hari lagi. "Apalagi kami mendapatkan informasi ada jemaah yang tiap hari melaksanakan umrah sunnah. Sementara prosesi puncak haji masih kurang dua minggu lagi," tuturnya.

Anggota Media Center Haji Kemenag, Widi Dwinanda mengatakan, PPIH terus mengintensifkan persiapan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Oleh karena itu, dari sekarang jemaah agar mempersiapkan diri sebaik mungkin terutama kesehatan fisik. "Jemaah dapat memaksimalkan musala hotel dan masjid di sekitar hotel untuk aktivitas ibadahnya. Membatasi bepergian ke luar hotel dan salat di Masjidil Haram yang saat ini mulai dipadati jemaah haji dari seluruh dunia," terangnya.

Selain itu, diingatkan pula, pastikan dokumen penting berupa smart card, gelang jemaah dan dokumen lainnya sebagai syarat masuk Armuzna telah aman dan tersimpan dengan baik. Bila smart card hilang, segera laporkan ke petugas haji untuk diproses penggantiannya.

Berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi, Selasa kemarin tercatat jemaah calon haji yang sudah tiba di Tanah Suci mencapai 169.958 orang yang terbagi dalam 433 kloter. Jemaah yang wafat berjumlah 39 orang, dengan rincian, jemaah wafat di Embarkasi 3 orang, di Madinah 15 orang, di Makkah 19 orang dan di Bandara 2 orang. Seluruh jemaah wafat akan dibadalhajikan. **(Jon/Ati)-f**

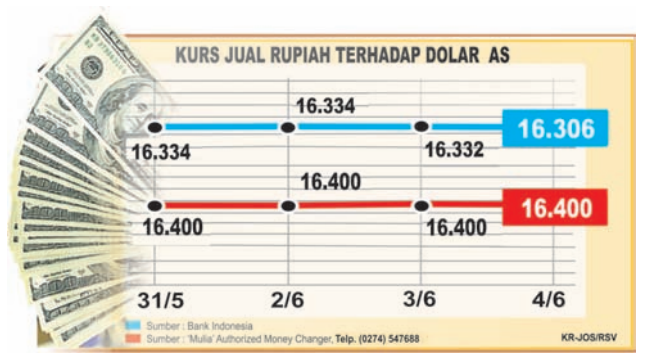

Prakiraan Cuaca — Rabu, 5 Juni 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Tentang Keresahan dan Kebebasan Berpendapat

Raden Arditya Mutwara L
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

BANYAK hal yang menjadi keprihatinan saya, dan mungkin juga Anda, belakangan ini. Mulai dari kenaikan UKT, potongan gaji untuk Tapera, dan juga tentang realisasi makan siang gratis. Meskipun akhirnya kenaikan UKT dianulir, tidak ada rakyat yang bisa menjamin hal tersebut berlaku selamanya. Tahun depan tidak menutup kemungkinan UKT (jadi) naik. Akhirnya mau tidak mau kita hanya mampu bergantung dan berharap kepada pasangan Prabowo Gibran selaku capres dan cawapres terpilih. Akan dibawa kemana negeri ini, keputusan ada di tangan mereka.

Setelah masalah UKT tadi mereda sejanak, timbul wacana baru yang cukup meresahkan sebagian warga, utamanya karyawan atau pegawai. Gaji mereka terancam dipotong guna menyokong program pemerintah tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Pro dan kontra langsung menghiasi laman-laman web dan media sosial di Indonesia. Semua penuh dengan kicauan netizen yang sebagian besar menolak wacana tersebut meskipun ada juga segelintir orang yang setuju. Sebagian besar yang menolak bersuara bahwa negara belum mampu menjamin potongan tersebut akan tersalurkan untuk kebutuhan rakyat.

Pemerintahan yang saat ini sedang dilanda trust issue justru memperburuk keadaan dengan adanya wacana Tapera ini. Beberapa mengatakan, rakyat lebih butuh lapangan kerja daripada rumah. Ada juga lainnya yang menyatakan setuju asal tepat sasaran. Ini yang nantinya akan menjadi masalah. Dari mana rakyat bisa tahu bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran? Siapa yang menentukan sasarannya? Apakah akan setransparan itu? Banyak pertanyaan yang berputar-putar di kepala. Kalau negara mampu menjawab keraguan ini, niscaya rakyat akan setuju.

Terakhir, tapi tidak berarti sepele, adalah tentang makan siang gratis. Program yang diusung pasangan calon terpilih, Prabowo-Gibran, belakangan direvisi namanya menjadi makan bergizi gratis. Konon katanya makan bergizi tersebut ditujukan untuk siswa sekolah yang tidak sempat sarapan atau makan pagi. Mengutip dari detik.com, Habiburrokhman (Waketum Gerindra) mengatakan alasan kata "siang" dihilangkan supaya lebih fleksibel. "Jadi nanti makan bergizi tersebut bisa saja diberikan pagi, siang, atau dibawa pulang," ucap Habiburrokhman.

Dari pernyataan di atas saja jelas terlihat bahwa pendistribusian program tersebut akan sangat rumit. Bayangkan saja ada berapa banyak sekolah di Indonesia, kalau tiap sekolah berbeda jam pendistribusiannya maka siapa yang mampu mengatur hal tersebut? Apakah sanggup menerapkan semua itu tahun depan? Rakyat akan menyaksikan bersama apakah program tersebut akan benar terealisasi atau malah menghilang perlahan. Belum permasalahan sumber dananya. Kemarin sempat terlontar akan diambil dari Baznas, kemudian dianulir.

Pada akhirnya pilihan ada di tangan rakyat karena suara rakyat pasti membawa dampak. Entah itu baik atau buruk, suara rakyat pasti berpengaruh terhadap kebijakan negara, contohnya polemik UKT kemarin. Akan berbeda apabila rakyat memilih bungkam dan in absentia dalam penyelenggaraan negara. Ingat, Indonesia adalah negara demokrasi, rakyat berhak menyampaikan pendapatnya dan itu diatur dalam undang-undang. Itu berarti, negara sudah sepatutnya menjamin keamanan rakyat dalam hal penyampaian pendapat.

Jangan sampai rakyat memilih bungkam karena merasa tidak aman, bahkan takut ketika menyampaikan pendapatnya. Apabila itu terjadi, bisa dikatakan negara gagal memberikan rasa aman kepada warganya. Jangan sampai negara tidak hadir ketika rakyat butuh berkeluh kesah menyampaikan uneg-uneg terkait kebijakan-kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ingat, itu semua diatur dalam undang-undang dan negara wajib hadir untuk rakyatnya.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park